

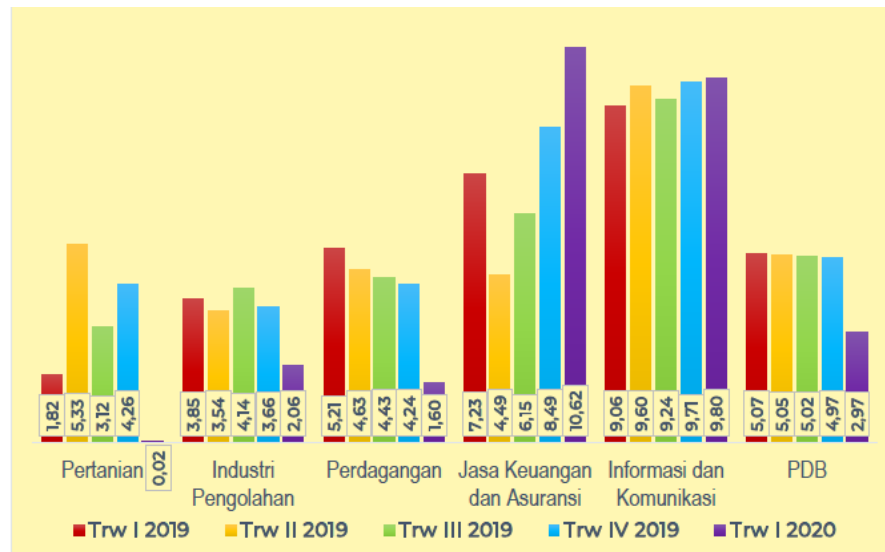
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan negara diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tolok ukur keberhasilan bahwa para *stakeholder* mampu mengelola negaranya. Berbagai faktor secara eksplisit akan memengaruhi aktivitas negara dan memberikan dampak yang begitu besar terhadap setiap sektor seperti perdagangan, jasa, dan industri. Stabilitas perekonomian negara dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kondisi lingkungan, alam, kesehatan, kurs, serta berbagai faktor lainnya.

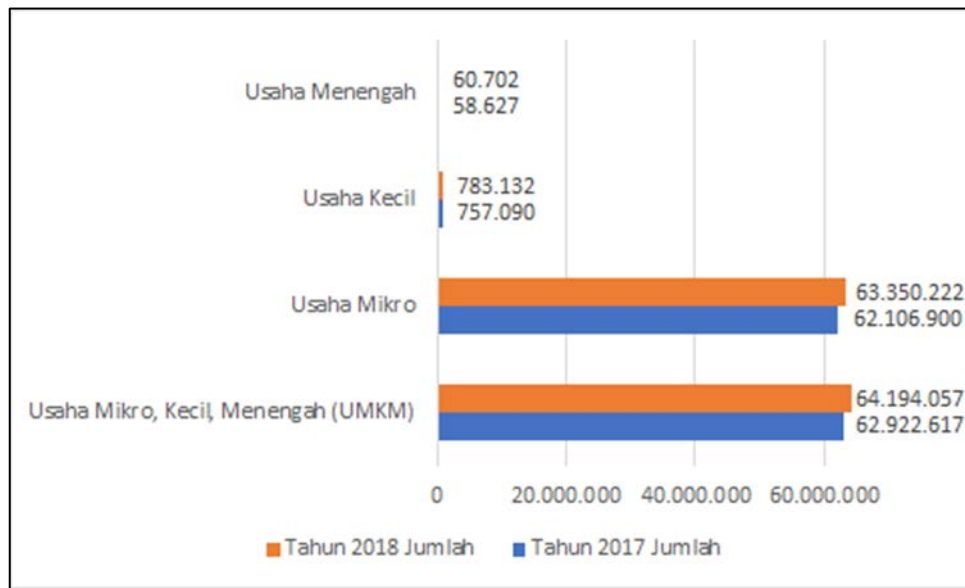
Baru-baru ini dunia dikejutkan adanya kondisi kesehatan yang mengancam perekonomian, yakni wabah virus (COVID-19). Indonesia juga merupakan salah satu negara yang ikut terdampak akibat COVID-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2020 sebesar 2,97% menurun jika dibandingkan dengan triwulan I 2019 sebesar 5,07% dan triwulan IV 2019 sebesar 4,97%. Hal ini disebabkan karena melambatnya konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan investasi serta terhambatnya kegiatan produksi akibat permintaan menurun. Berdasarkan gambar 1.1, penurunan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 dari sisi produksi terjadi akibat perlambatan pertumbuhan beberapa sektor, khususnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; dan sektor perdagangan. Pelaku-pelaku dari sektor industri yang mengalami perlambatan pertumbuhan tersebut tidak hanya perusahaan besar tetapi mayoritas adalah usaha mikro, kecil, dan menengah.



Gambar 1.1
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (%)

Sumber: Pusat Data Kementerian Perindustrian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM merupakan usaha milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki karakteristik seperti total aset terkecuali tanah dan bangunan tempat usaha atau omzet tahunan. UMKM memiliki peran dalam membangun perekonomian negara. Peran UMKM pertama adalah membantu pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja. Proporsi UMKM sebesar 99,9% mampu menampung 97% tenaga kerja (Badan Pusat Statistik, Kementerian Koperasi dan UMKM, 2018). Kedua, UMKM berkontribusi atas Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2018 sebesar 61,07% PDB Indonesia berasal dari sektor UMKM. Ketiga, UMKM memberikan pemasukan devisa bagi negara. Berdasarkan gambar 1.2, jumlah UMKM pada skala nasional tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 2,02%. Jumlah unit usaha terbesar terletak pada usaha mikro. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha mikro menjadi usaha yang paling dominan di Indonesia.



Gambar 1.2
Perkembangan Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS)

Di masa pandemi COVID-19, UMKM juga terdampak akibat pemberlakuan PSBB. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik per September 2020, sebanyak 82,8% UMKM terdampak akibat COVID-19. Dari data tersebut sebesar 80% UMKM mengalami penurunan permintaan, 60% tidak dapat beroperasi secara normal, dan 57,69% mengalami kendala keuangan terkait pegawai dan operasional. Data ini menunjukkan bahwa pada masa COVID-19 kinerja UMKM semakin menurun. Kinerja adalah hasil yang diperoleh badan usaha dalam mencapai tujuannya. Kinerja diukur menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif. Ukuran kuantitatif mencakup capaian keuangan, produksi, pemasaran, dan efisiensi (Purnomo dan Lestari, 2010). Sedangkan ukuran kualitatif mencakup kepuasan dan pencapaian diri, kebanggaan, dan fleksibilitas dalam aktivitas (Buttner and Moore, 1997). Masalah lain yang memperburuk kinerja UMKM adalah selama ini UMKM tidak memiliki standar pencatatan keuangan yang baik karena menggabungkan keuangan pribadi dengan uang usaha. Hal ini menyebabkan pengukuran kinerja UMKM secara kuantitatif sulit dilakukan sehingga digunakan persepsi kinerja. Persepsi kinerja adalah subjektivitas dalam pengukuran kinerja dikarenakan persepsi yang berbeda dalam menentukan keberhasilan usaha (Simpson *et al.*,

2004). Oleh karena itu, selama COVID-19 dibutuhkan sebuah cara bertransaksi yang efektif agar kinerja UMKM tidak semakin menurun.

Perkembangan teknologi yang pesat menghadirkan *fintech* yang dapat membantu UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan dengan mudah dan menyediakan cara bertransaksi dengan efisien. *Financial technology (fintech)* adalah kombinasi antara jasa keuangan dan teknologi yang menawarkan efisiensi dalam aktivitas keuangan dibandingkan dengan layanan keuangan tradisional. *Fintech* memungkinkan penggunanya dapat mengakses layanan keuangan dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, penggunaan *fintech* tidak terlepas dari akses internet dan *smartphone*.

Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada kuartal II tahun 2020, sebanyak 73,7% penduduk Indonesia sudah terhubung ke internet. Hal ini mengindikasikan bahwa internet sudah banyak diakses oleh penduduk Indonesia. *The Global Findex Database* (2017), juga menyatakan bahwa *smartphone* dan layanan internet dapat memberikan kemudahan akses untuk bertransaksi pada layanan keuangan. *Fintech* dapat membantu mengatasi hambatan dan mempermudah untuk mengakses layanan keuangan sehingga akses pada jasa keuangan semakin meningkat (Winarto, W. W. A., 2020). Salah satu jenis *fintech* yang dapat membantu aktivitas UMKM adalah *payment, settlement and clearing*. *Payment, settlement and clearing* merupakan *fintech* yang menawarkan kemudahan pembayaran secara online melalui dompet elektronik seperti Go-pay, OVO dan LinkAja. Dengan menggunakan *fintech* ini UMKM dapat melakukan pembayaran, menerima pembayaran atas penjualan produk atau jasa serta pengecekan transaksi yang terjadi. Oleh karena itu, semakin memahami tentang *fintech* maka UMKM mampu mengetahui sumber pendapatan yang paling efektif dan efisien sehingga transaksi semakin lancar. Apabila transaksi berjalan lancar maka UMKM berpeluang untuk dapat menambah pangsa pasarnya melalui *marketplace* sehingga hal ini berdampak pada peningkatan profitabilitas. Literasi *fintech* yang baik akan membantu UMKM dalam menggunakan produk *fintech* secara optimal sehingga berdampak pada peningkatan profitabilitas. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin baik kinerja UMKM.

Literasi keuangan adalah wawasan dan keahlian terkait keuangan meliputi penerapan tentang konsep dan risiko serta membuat keputusan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik secara individu maupun kelompok (Gerakan Literasi Nasional, 2017). Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03%. Angka ini meningkat dibandingkan hasil survei OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7%. Tingkat literasi keuangan yang tinggi mengindikasikan bahwa pengetahuan tentang produk keuangan semakin baik sehingga berdampak pada pengelolaan usaha yang lebih baik. Literasi keuangan akan memengaruhi cara pengambilan keputusan strategis serta pengelolaan usaha yang lebih baik bagi pelaku usaha didasarkan pada kondisi keuangan (Anggraeni, 2016). Literasi keuangan akan membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan dengan baik sehingga tingkat profitabilitas dan kinerja usaha semakin baik. Literasi keuangan juga diperlukan pengguna layanan *fintech* dalam memilih produk keuangan yang paling tepat.

Penelitian ini berusaha mengetahui tingkat literasi keuangan, literasi *fintech*, dan kinerja UMKM di Kota Surabaya dan Kota Kediri pada masa pandemi COVID-19. UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian suatu negara. UMKM mampu menyumbang sebagian besar PDB dan mampu bertahan bahkan di kondisi yang tidak pasti seperti krisis dan pandemi. Dengan adanya peningkatan kinerja bagi UMKM dapat membantu peningkatan perekonomian suatu negara. Pemerintah dan pihak swasta turut serta dalam memberikan edukasi dan sosialisasi agar UMKM semakin paham pentingnya literasi keuangan dan literasi *fintech*. Di masa pandemi seperti ini, literasi keuangan dan literasi *fintech* penting agar mempermudah transaksi, mempercepat akses pendanaan serta mengurangi interaksi secara langsung.

Kota Surabaya dan Kota Kediri dipilih sebagai tempat melakukan penelitian didasarkan pada karakteristik UMKM di kedua kota tersebut yang berbeda. Karakteristik yang ditinjau meliputi jumlah PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) dan jumlah UMKM. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2018 kontribusi UMKM di Kota Surabaya terhadap PDRB

Kota Surabaya adalah sebesar 261,46 triliun atau 48.01% dari total PDRB Kota Surabaya sebesar 544,59 triliun. Sedangkan, kontribusi UMKM Kota Kediri terhadap PDRB Kota Kediri adalah sebesar 42,91 triliun atau 33,44% dari total PDRB Kota Kediri sebesar 128,29 triliun. Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016 dan SUTAS 2018 terdapat sejumlah 374.533 UMKM di Kota Surabaya. Sedangkan berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri 2020 terdapat sejumlah 4.971 UMKM di Kota Kediri. Baik di Kota Surabaya maupun Kota Kediri, UMKM didominasi oleh sektor non pertanian khususnya di sektor usaha perdagangan, pengolahan, penyediaan akomodasi, dan makanan minuman. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kota memiliki karakteristik yang sama pada dominasi sektor UMKM.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM?
2. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap literasi *fintech*?
3. Apakah literasi *fintech* berpengaruh terhadap kinerja UMKM?
4. Apakah literasi keuangan secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja UMKM melalui literasi *fintech*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM.
2. Mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap literasi *fintech*.
3. Mengetahui pengaruh literasi *fintech* terhadap kinerja UMKM.
4. Mengetahui pengaruh tidak langsung literasi keuangan terhadap kinerja UMKM melalui literasi *fintech*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi pihak akademisi, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memberikan literasi keuangan dan *fintech* pada dunia pendidikan khususnya sektor UMKM.
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, penelitian ini diharapkan mampu memberikan fakta lapangan terkait implementasi literasi keuangan serta *financial technology* pada sektor UMKM dan mengevaluasi strategi instansi dalam meningkatkan literasi keuangan maupun *fintech* masyarakat Indonesia.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai referensi, masukan, memperluas, dan menyempurnakan penelitian yang serupa terkait literasi keuangan, literasi *financial technology*, dan kinerja UMKM.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam membantu penulisan dan menemukan jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga membahas hipotesis penelitian, beberapa penelitian terdahulu, model analisis, serta kerangka berpikir.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data,

prosedur pengumpulan data, prosedur penentuan sampel, serta teknik analisis.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis model dan pengujian hipotesis, serta pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan penelitian serta saran dari penulis mengenai penelitian ini.